

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
XIII		<p>URUSAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>1. KEBIJAKAN</p> <p>Kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, pengelolaan B3,limbah B3,dan sampah, penataan hukum lingkungan, komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas</p> <p>A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Wilayah 2) Kajian Perencanaan Lingkungan Hidup Sektor 3) Kajian Dampak Lingkungan 4) Pengembangan Perangkat Kebijakan <p>B. Penyiapan bahan</p> <p>C. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan</p> <p>D. Pengumpulan dan pengolahan data</p> <p>E. penetapan dalam bentuk NSPK</p> <p>2. TATA LINGKUNGAN</p> <p>A. Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Inventarisasi, penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumentasi Inventarisasi b) Pedoman Inventarisasi c) Penetapan Ekoregion d) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional e) Pedoman Penyusunan RPPLH Kabupaten 2) Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam <ol style="list-style-type: none"> a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam <p>B. Penerapan Kebijakan</p>	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Evaluasi Penerapan 2) Perencanaan Lingkungan Hidup C. Ekonomi Lingkungan 1) Perencanaan a) Valuasi Ekonomi b) Internalisasi Lingkungan 2) Insentif dan Pendanaan Lingkungan D. Dampak Lingkungan 1) Bimbingan teknis Dampak Lingkungan 2) Penerapan Sistem Kajian Dampak Lingkungan	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Terbatas	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka tertutup	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas</p> <p>3) Agro Industri dan Usaha Skala Kecil</p> <p>a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil</p> <p>4) Udara Sumber Bergerak</p> <p>a) Transportasi Air dan Udara b) Transportasi Darat c) Kendaraan Berat</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>
		B. Evaluasi dan Pengembangan					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1) Manufaktur, Prasarana dan Jasa</p> <p>a) Industri Kimia b) Industri Logam, Elektronika dan Mesin c) Aneka Industri d) Prasarana dan Jasa</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		2) Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
		<p>3) Agro Industri dan Usaha Skala kecil</p> <p>a) Peternakan dan Perikanan b) Perkebunan c) Kehutanan dan Holtikultura d) Usaha Skala Kecil</p>	Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>4) Udara Sumber Bergerak</p> <p>a) Transportasi Darat, Air dan Udara b) Kendaraan Berat</p> <p>4. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN A. Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan</p> <p>1) Pengembangan</p> <p>a) Sumber Daya Genetik b) Keamanan Hayati</p> <p>2) Pemanfaatan</p> <p>Sumber Daya Genetik 3) Pengelolaan Sumber Daya Genetik</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3) Pengendalian Bahan Perusak Ozon</p> <p>a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan lapisan ozon</p> <p>4) Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <p>D. Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>1) Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim</p> <p>2) Kerentanan Perubahan Iklim</p> <p>a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim b) Media kliring kerentananan perubahan iklim</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>
		5. PENGELOLAAN B3, LIMBAH, DAN SAMPAH					

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>4) Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p> <p>a) Notifikasi b) Rekomendasi Limbah Lintas Batas</p> <p>C. Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3</p> <p>1) Pemantauan</p> <p>a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p> <p>2) Tanggap Darurat dan Pemulihan Kontaminasi</p> <p>a) Pertambangan, Energi, dan Minyak dan Gas b) Manufaktur c) Agroindustri d) Prasarana, Jasa, dan Non Institusi</p> <p>D. Pengelolaan Sampah</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>Terbuka</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Pembatasan Sampah 2) Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 3) Pembentukan Dewan Adipura 4) Penetapan Pemenang Adipura 6. HUKUM LINGKUNGAN A. Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan Pengembangan Pengaduan a) Pengelolaan Pengaduan b) Pengembangan Pengaduan 2) Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan a) Penerapan hukum administrasi lingkungan b) Pengembangan hukum administrasi lingkungan B. Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal Pengguna internal dan eksternal	Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun. Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>1) Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan</p> <p>a) Administrasi Gugatan b) Gugatan</p> <p>2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan</p> <p>a) Kerugian Negara dan Masyarakat b) Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</p> <p>C. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan</p> <p>1) Penyidikan</p> <p>a) Administrasi Penyidikan b) Pelaksanaan Penyidikan</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>2) Koordinasi Penuntutan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut</p> <p>a) Koordinasi penuntutan b) Evaluasi dan tindak lanjut</p> <p>3) Koordinasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil</p> <p>7. KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A. Komunikasi Lingkungan</p> <p>1) Pengembangan Komunikasi</p> <p>a) Program Komunikasi b) Evaluasi Komunikasi</p> <p>2) Publikasi dan Kampanye</p> <p>a) Publikasi b) Kampanye</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIF IKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>B. Penguatan Inisiatif Masyarakat</p> <p>1) Komunitas Pendidikan Lingkungan</p> <p> a) Pengembangan dan Bimbingan</p> <p> b) Evaluasi</p> <p>2) Kearifan Lingkungan</p> <p> a) Inventarisasi</p> <p> b) Revitalisasi</p> <p>C. Peningkatan Peran Masyarakat</p> <p>1) Masyarakat Perkotaan</p> <p> a) Masyarakat Kawasan Permukiman</p> <p> b) Masyarakat Kawasan Rentan</p> <p>2) Masyarakat Pedesaan</p> <p> a) Masyarakat Petani</p> <p> b) Masyarakat Nelayan</p> <p>D. Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>1) Organisasi Sosial Dan Masyarakat</p>	<p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p> <p>Biasa/terbuka</p>	<p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p> <p>Pengguna internal dan eksternal</p>	<p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p> <p>Terbuka</p>	<p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p> <p>Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		1) Kelembagaan dan Tata Laksana a) Pengembangan Kelembagaan b) Tata Laksana 2) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal a) Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Daerah Kabupaten C. Standarisasi dan Teknologi	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
		1) Standarisasi Manajemen dan Pengujian Lingkungan a) Perangkat Manajemen Lingkungan b) Pengujian Lingkungan 2) Standardisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan a) Kompetensi Keahlian Lingkungan b) Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan	Biasa/terbuka	Pengguna internal dan eksternal	Terbuka	Apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait
			Terbatas	Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum	tertutup	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.	Unit Pengolah Terkait

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	AKSES PUBLIK	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>3) Teknologi Ramah Lingkungan</p> <p>a) Pengembangan Kriteria Teknologi Ramah Lingkungan b) Verifikasi Teknologi Ramah Lingkungan</p> <p>D. Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan</p> <p>1) Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan</p> <p>a) Pemantauan Kualitas Lingkungan b) Kajian Kualitas Lingkungan</p> <p>2) Laboratorium Rujukan dan Pengujian</p> <p>a) Laboratorium Rujukan b) Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi</p>	<p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p> <p>Terbatas</p>	<p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p> <p>Penentu kebijakan, pengawas internal dan eksternal serta penegak hukum</p>	<p>tertutup</p> <p>tertutup</p> <p>tertutup</p>	<p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p> <p>Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.</p>	<p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p> <p>Unit Pengolah Terkait</p>